

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 142 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BAGIAN 8900-3.5

(*STAFF INSTRUCTION 8900-3.5*)

PERSETUJUAN KOMPONEN/ PENGUMPULAN KOMPONEN/

PEMINJAMAN KOMPONEN

(*APPROVE PARTS/ PARTS POOL/ PARTS BORROWING*)

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa dalam Subbagian 121.369 (f) (15) Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers*) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2017 telah mengatur bahwa pemegang sertifikat operator pesawat udara (AOC) 121 harus memiliki prosedur terkait fasilitas perawatan pesawat udara yang tertuang dalam manualnya;

- b. bahwa dalam Subbagian 135.369 (g) (15) Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan – Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017 telah mengatur bahwa pemegang sertifikat operator pesawat udara (AOC) 135 harus memiliki prosedur terkait fasilitas perawatan pesawat udara yang tertuang dalam manualnya.
- c. bahwa prosedur terkait fasilitas perawatan udara sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b termasuk prosedur penanganan tempat pengumpulan komponen atau bagian-bagian pesawat udara dan prosedur penanganan untuk peminjaman komponen atau bagian-bagian pesawat udara.
- d. bahwa perlu disusun prosedur bagi Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat udara dalam melakukan evaluasi prosedur penanganan tempat pengumpulan komponen atau bagian-bagian pesawat udara dan prosedur penanganan untuk peminjaman komponen atau bagian-bagian pesawat udara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900-3.5 (*Staff Instruction 8900-3.5*) Persetujuan Komponen/ Pengumpulan Komponen/ Peminjaman Komponen (*Approve Parts/ Parts Pool/ Parts Borrowing*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) ;

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 78 Tahun 2000 tentang Perawatan, Perawatan Preventif, Perbaikan dan Modifikasi Pesawat Udara;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan – Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers*) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 Tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/250/IV/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 43.13-2 (*Advisory Circular (AC) Part 43.13-2*) tentang Metode, Teknis dan Pelaksanaan Modifikasi Pesawat Udara Yang Diperbolehkan (*Acceptable Methods, Techniques And Practices Aircraft Alterations*);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BAGIAN 8900-3.5 (*STAFF INSTRUCTION 8900-3.5*) PERSETUJUAN KOMPONEN/ PENGUMPULAN KOMPONEN/ PEMINJAMAN KOMPONEN (*APPROVE PARTS/ PARTS POOL/ PARTS BORROWING*).

Pasal 1

Memberlakukan Petunjuk Teknis Bagian 8900-3.5 (*Staff Instruction 8900-3.5*) Persetujuan Komponen/ Pengumpulan Komponen/ Peminjaman Komponen (*Approve Parts/ Parts Pool/ Parts Borrowing*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mengawasi Pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/338/XII/1999 tentang *Advisory Circular 121-16 Maintenance Certification for Approve Part Pool and Borrowing Procedures*;

2. ketentuan dalam Volume 2 Bab 87 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/44/III/2010 tentang Staff Instruction 8300 Airworthiness Inspector's Handbook; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

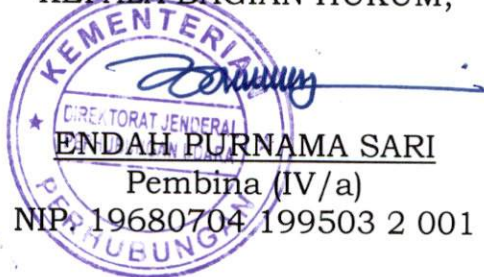
Pada tanggal : 16 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

Dr.Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Staff Instruction

SI 8900 – 3.5

APPROVE PARTS/ PARTS POOL/ PARTS
BORROWING

Edition : 1
Amendment : 0
Date :

REPUBLIC OF INDONESIA – MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
JAKARTA – INDONESIA

AMENDMENT RECORD LIST

Amendment No.	Issue Date	Inserted By	Insertion Date
Original Issue (Edition 1)	16 May 2018		

SUMMARY OF AMENDMENTS

Amendment No	Source/s	Subject/s	Approved
Original (Edition 1)			

FOREWORD

1. PURPOSE : The Staff Instruction Approve Part/Part Pool and Part Borrowing has been prepared for use and guidance of DGCA inspectors for the performance of procedure for Approve Part/Part Pool and Part Borrowing on the Aircraft operated by domestic and foreign operators. It is designed to provide foundation for promoting safety through proactive safety oversight system. The provision of this Staff Instruction shall apply to the Approve Part/Pool Part and Part Borrowing activities on both, domestic and foreign aircraft operators.

All subject matters pertaining to Approve Part/Part Pool and Part Borrowing activities, procedures, functions and responsibilities of DGCA are covered in this Staff Instruction.

2. REFERENCES : This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable regulations.
3. CANCELLATION : SI 8300 Volume 2 Chapter 87 and AC 121-16 has been cancelled.
4. AMENDMENT : The amendment of this Staff Instruction shall be approved by the Director General of Civil Aviation.

TABLE OF CONTENTS

AMENDMENT RECORD LIST.....i

SUMMARY OF AMENDMENTSii

FOREWORD.....iii

TABLE OF CONTENTSiv

CHAPTER I. INTRODUCTION.....5

1. Objective.....5

2. General.....5

3. Parts Pool Agreement Authorizations.....6

4. Parts Borrowing Authorization7

5. Parts Approval8

6. Typical Parts Pooling And Borrowing Approvals.....9

7. Prerequisites And Coordination Requirements.....10

8. References And Forms10

9. Procedures.....11

10. Task Outcomes11

APPENDIX A.....12

List Of Applicable Form

DGCA Form Number 120-82 Evaluation Of Approve Parts/Parts Pool/Parts Borrowing

CHAPTER I. INTRODUCTION

1. Objective

This chapter provides guidance in evaluating and approving aircraft parts, a CASR Part 121 parts pool, and a CASR Part 121 and 135 parts borrowing authorization.

2. General

a. Definitions

- 1) Articles: Materials, parts, or appliances.
- 2) Operator Manufactured Parts: Parts manufactured and documented by the operator for use only on that operator's aircraft. The parts must comply with the original type design and cannot be part of a pool or borrowing agreement.
- 3) Parts: Any engine, propeller, component, accessory, material, or hardware used on an air carrier aircraft.
- 4) Parts Manufacturer Approval (PMA): PMA parts are parts produced by manufacturers other than the type certificate holder. These parts must be identical to parts covered under a type certificate, and they must be marked as such. DGCA maintenance inspectors or a manufacturer with parts manufacturer approval authority may approve these parts for use.
- 5) Supplemental Type Certificate (STC): When a major change in type design does not require a new application for a type certificate, a supplemental type certificate is issued. Parts manufactured under a supplemental type certificate are approved under the supplemental type certificate.
- 6) Technical Standard Order (TSO): A technical standard order is a minimum performance standard for specified articles used on civil aircraft, and is issued by DAAO (Directorat of Airworthiness and Aircraft Operation). These articles may be used on a variety of equipment items.
- 7) Type Certificate (TC): As defined by CASR Section 21.41, a type certificate includes the type design, operating limitations, type certificate data sheet, applicable regulations, and any other conditions or limitations prescribed by the DGCA.

- b. An operator must ensure that all replacement parts meet or exceed original certification standards.

Standard hardware and materials can be used and exchanged without special procedures. When special requirements must be met, accurate documentation must be maintained. Purchase, use, and exchange of parts require special procedures that must be part of the operator's manual, and in certain circumstances, part of the operator's Authorization, Conditions and Limitations.

3. Parts Pool Agreement Authorizations

These authorizations apply only to CASR Part 121 operators operating outside Indonesia

- a. When operating under this authorization

All other provisions of CASR Part 121 remain applicable.

In addition, CASR Section 121.361(b) requires surveillance of the foreign facilities and their procedures to ensure that all work on pooled parts is performed according to the operator's manuals.

- b. These authorizations are approved by issuance of Authorization, Conditions and Limitations.

The Authorization, Conditions and Limitations are required only to list those participants (and their locations) inspected by the operator and acceptable to the DGCA.

- 1) In instances where several Indonesian certificated operators use a foreign facility, the DGCA does not object to a participating operator accepting another participating operator's initial or biennial inspection report, provided the operator's manual reflects the arrangement.
- 2) When an Indonesian parts pool participant's Authorization, Conditions and Limitations are amended to reflect a new participant or location, all Indonesian participants in the pool must amend their Authorization, Conditions and Limitations to reflect the change.

- 3) CASR Section 121.361 permits deviation allowing the return to service and use of airframe components, powerplants, appliances, and spare parts thereof that have been maintained, altered, or inspected by persons employed outside Indonesia who do not hold Indonesian AMEL (Aircraft Maintenance Engineer License). The operator's Authorization, Conditions and Limitations authorize this deviation.
- c. Foreign Facility Inspections
- 1) The Principle Airworthiness Inspector (PAI) conducts the parts pool inspection. Foreign facilities that do not have an appropriate Approved Maintenance Organization rating should be inspected annually.
 - 2) The operator must have in its manual procedures to inspect the parts pooling facilities. The manual also must include procedures to ensure the maintenance of parts according to the operator's maintenance manuals.

4. Parts Borrowing Authorization

a. Time Limits

A certificate holder operating under CASR Part 121 or 135 may be issued Authorization, Conditions and Limitations to allow it to borrow a part with a higher time since overhaul than authorized, subject to certain conditions and limitations. Since no regulations govern this activity, the Authorization, Conditions and Limitations must specify that the operator can borrow a part from another operator when the time in service of the available part exceeds the operator's approved overhaul time limit. The parts, however, cannot exceed the lender's approved time limits.

b. Landing Limits

If the number of landings controls the part's service or overhaul time limit, an operator may borrow and use a part for a maximum of 100 hours or 50 landings when the time in service of the part exceeds the borrower's approved time limits. The following limitations must be met:

- 1) The part must have a minimum time of 200 hours or 100 landings (if approved time is controlled by landings) remaining before service or overhaul in the lender's program.

- 2) If the part is life-limited, the part may not be operated beyond its approved life limit.

5. Parts Approval

a. Questionable Parts

Under present regulations, the DGCA does not have the authority to prevent the sale or use of aircraft parts of questionable serviceability.

Although it is the operator's responsibility to be aware of the possible consequences of using questionable parts on certificated aircraft, the inspector should offer guidance to help prevent possible problems. An operator using a part of unknown quality, condition, or origin must be able to prove conclusively that such parts conform to the provisions of CASR Section 43.13.

b. Proper Maintenance

The operator is responsible for maintaining parts in a condition that ensures the parts continue to meet the original type design.

Procedures to ensure this proper maintenance must be part of the operator's manual.

c. DGCA Approval System

The DGCA has a parts manufacturing approval system in effect that allows the DGCA to control the sale of reproduction parts.

Parts manufactured under this system must display evidence of DGCA approval, verifying the origin and serviceability.

d. Manufacturing Replacement Parts

Repair stations or air carriers may manufacture replacement parts as part of their maintenance program. These parts are acceptable, provided they are manufactured according to acceptable DGCA-approved data.

e. Replacement from Other Aircraft parts

Appliances and components from aircraft that have been involved in accidents or crashes are available to the industry as replacements. CASR Section 43.13 requires that serviceability is assured before use.

f. Imported Parts

Parts manufactured in foreign countries and supplied to Indonesian certificated operators for use on their aircraft must be imported according to CASR Section 21.502.

6. Typical Parts Pooling And Borrowing Approvals

a. Parts Pool Agreement Authorization (ACL D81)

(name of operator) is authorized to participate in a parts pool agreement subject to the following conditions and limitations:

- 1) *Only the parts pool participants listed in the table below shall be eligible to provide parts to (name of operator) .*

LOCATION	STATION	PARTICIPANT
Amsterdam	AMS	KL
Bangkok	BKK	BR
Hongkong	HKG	BR, CX

- 2) *(name of operator) shall not use any part provided by any participant identified herein unless that part complies with applicable provision of the Regulations and the certificate holder's manual.*
- 3) *Administration of this agreement, related policies, and maintenance procedures, including those procedures pertaining to the control over subsequent revisions of maintenance data by the foreign air carrier, shall be included in (name of operator) manual.*

b. Parts Borrowing Authorization (ACL D83)

(name of operator) is authorized to use a borrowed part in accordance with the following conditions and limitations:

- 1) *The borrowed part must be obtained from a certificated operator maintaining aircraft under a continuous airworthiness maintenance program.*
- 2) *A borrowed part having a higher time in service since overhaul that (name of operator) approved overhaul time limit may be used as follows:*

- 1) *The part must have at least 200 hours time in service remaining until overhaul (or 100 landings if the overhaul time limit is controlled by landings) in relation to the lender's overhaul time limit.*
- 2) *The part may be used for a time period not to exceed 100 hours time in service (or 50 landings if the overhaul time limit is controlled by landings).*
- 3) *(name of operator) shall not use a "life-limited" borrowed part beyond its approved life limit.*

c. Prerequisites And Coordination Requirements

A. Prerequisites

- Knowledge of the regulatory requirements of CASR Parts 121 and 135
- Successful completion of the Principle Airworthiness Inspectors (PAI) Indoctrination Course

B. Coordination

This task requires coordination between the involved PAI and the operator.

7. References And Forms

A. References

- CASR Section 21.301 thru 21.305, 43.13, 121.379, 121.361(b), 135.379 and 135.361(b).
- Advisory Circular 43.13-2, Acceptable Methods, Techniques and Practices - Aircraft Inspection and Repair, as amended.

B. Forms

- DGCA Form 120-82 Evaluation Approve Parts/ Parts Pool/ Parts Borrowing.

8. Procedures

A. Review Operator's Manual for Parts Pool Authorization.

Ensure the manual includes:

- 1) Procedures to ensure qualified personnel of the operator's organization perform an initial inspection of the involved foreign facilities. This inspection should ensure that facilities meet the certificate holder's manual requirements, have properly qualified and trained personnel, and can furnish the parts intended.
- 2) Procedures to provide for biennial inspections of the foreign facilities to ensure continued conformity to the operator's manual in supplying the required parts.
- 3) Inclusion of, or reference to, the foreign facilities' maintenance programs in the operator's manual, if applicable.

B. Review Operator's Manual for Parts Borrowing Authorization Procedures

- 1) Ensure the manual includes the following procedures:
 - a) Procedures that restrict the overhaul time limits to those authorized by Authorization, Conditions and Limitations.
 - b) Procedures that restrict a remaining minimum time to overhaul to that authorized by Authorization, Conditions and Limitations.
- 2) Ensure the operator has an approved list of authorized vendors, AMO, and air carriers from which it may borrow parts.

9. Task Outcomes

A. File Form

B. Successful completion of this task will result in issuance of the following Authorization, Conditions, and Limitation (ACL)

- Parts Pooling Authorization, Authorization, Conditions, and Limitation (ACL) Paragraph D81
- Parts Borrowing Authorization, Authorization, Conditions, and Limitation (ACL) Paragraph D83

C. Document Task

File all supporting paperwork in the operator's office file.

APPENDIX A

List Of Applicable Form

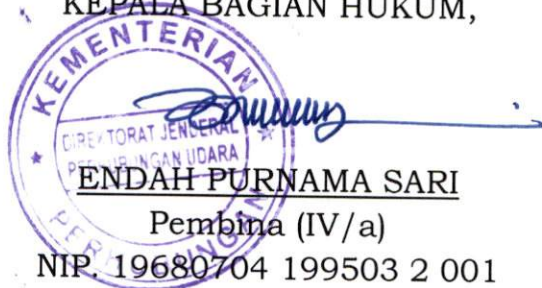
- DGCA Form Number 120-82 Evaluation Of Approve Parts/Parts Pool/Parts Borrowing.

DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

ttd.

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001